

**TATA KELOLA PUSAT KULINER PANTAI PADANG DALAM
MENINGKATKAN FASILITAS PUBLIK
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD THUFEIL ARABBI

NIM/BP: 21042311/2021

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang
Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik**

Nama : **Muhammad Thufeil Arabbi**

TM/NIM : **2021/21042311**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

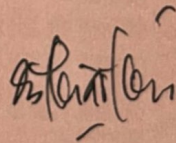
Departemen : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, 25 September 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Yuliarti, S.E., M.E

NIP. 19890726 201903 2 012

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 08 Agustus 2025 Pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB

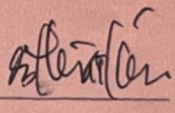
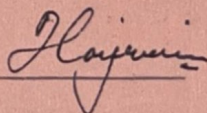
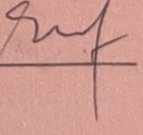
Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan

Fasilitas Publik

Nama : Muhammad Thufeil Arabbi
TM/NIM : 2021/21042311
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 September 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Yuliarti, S.E, M.E	1. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani., M.Si	2. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaldip, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Thufeil Arabbi
TM/NIM : 2021/21042311
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 08 Juni 2003
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik”** Adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Thufeil Arabbi
2021/21042311

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk melalui pengelolaan kawasan kuliner sebagai daya tarik wisata. Salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata adalah dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pusat Kuliner Pantai Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pusat kuliner tersebut dalam meningkatkan fasilitas publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap sembilan informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, pedagang, dan pengunjung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang memiliki perencanaan yang cukup matang, ditunjang oleh regulasi formal seperti Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun 2014. Namun pengorganisasian tidak dilakukan secara nyata di lapangan, dan fungsi pengawasan oleh Dinas Pariwisata belum optimal. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi keberadaan regulasi, penyediaan fasilitas dasar, serta pelatihan kewirausahaan bagi PKL. Faktor penghambat tersebut meliputi penolakan sebagian PKL terhadap relokasi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan lemahnya pengawasan keberlanjutan. Kesimpulannya, tata kelola pusat kuliner masih perlu diperkuat terutama pada aspek pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan ruang publik pariwisata, dan dapat menjadi rujukan dalam kebijakan tata kelola kawasan kuliner secara inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pusat Kuliner, Fasilitas Publik, Relokasi PKL, Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik Skripsi” Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Yuliarti, S.E.,M.E selaku dosen Penasehat Akademik (PA) serta dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mambantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Rahmadhani Yusran, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Superhero dan Panutanku, Abi Asril Aburdin, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama perkuliahan ini. Harapan yang selalu ada di setiap Doa yang penulis panjatkan “Semoga Allah menyertai dan memberkati abi didalam mengajari dan menuntun kami anak-anak yang telah Allah titipkan, semoga selalu diberikan Kesehatan yang melimpah dan dipanjangkan umurnya, Aminn YRA, I love you.
8. Pintu surgaku, Umi Ona Yunizar, yang tidak henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta Doa kepada penulis, yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya. Walaupun beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga selalu diberikan Kesehatan yang melimpah dan dipanjangkan umurnya. Aminn YRA, I love you more more more
9. Kepada Kakak saya Wiwilya Yolanda, S.M.,MM , yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu sumber donator penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga diberikan Kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Aminn YRA, I love you.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan menjadi amal saleh serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya Rabbal’alamin Semoga mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca dan dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara.

Padang, 24 Juni 2025

Muhammad Thufeil Arabbi

21042311

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	10
C. BATASAN MASALAH	10
D. RUMUSAN MASALAH	10
E. TUJUAN PENELITIAN	11
F. MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Tata Kelola.....	13
B.Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B.Fokus Penelitian.....	22
C.Lokasi Penelitian.....	23
D. Informan Penelitian.....	23
E.Jenis dan Sumber Data.....	24
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	25
G. Uji Keabsahan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Temuan Umum.....	30
B.Temuan Khusus	47
C.Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Stand Pusat Kuliner Pantai Padang	6
Gambar 1.2 Kondisi Stand Pusat Kuliner Padang Panjang	7
Gambar 1.3 Penumpukkan Sampah Di Sekitaran Pusat Kuliner Pantai Padang	8
Gambar 2.1 Governance.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	20
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Padang.....	31
Gambar 4.1 Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang	33
Gambar 4.3 Struktur Dinas Pariwisata Kota Padang	34
Gambar 4.4 Kanopi Pusat Kuliner Pantai Padang	49
Gambar 4.5 Sosialisasi Pemko Padang Dengan PKL Pantai Padang	51
Gambar 4.6 Pelatihan Dinas Pariwisata Dengan PKL	57
Gambar 4.7 Penertiban PKL Di Kawasan Pantai Padang.....	59
Gambar 4.8 ASN Mengunjungi Pusat Kuliner Pantai Padang.....	60
Gambar 4.9 Lokasi Relokasi Pusat Kuliner Pantai Padang	68
Gambar 4.10 Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner	70
Gambar 4.11 Aksi Demonstrasi PKL Terhadap Pemerintah.....	73
Gambar 4.12 Kondisi Pusat Kuliner Pantai Padang	78
Gambar 4.13 Kondisi Trotoar Pusat Kuliner Pantai Padang.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Kota Padang	2
Tabel 3.1 Informan Penelitian	24
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Padang	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik.....	95
Lampiran 2. Surat izin penelitian.....	102
Lampiran 3 surat balasan dari dinas	103
Lampiran 4. Perda No. 3 Tahun 2014	104
Lampiran 5 Wawancara Dengan Pihak Dinas Pariwisata	105
Lampiran 6 Wawancara Dengan Pengunjung Pusat Kuliner Pantai Padan	106
Lampiran 7 Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Pusat Kuliner Pantai Padang.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023), sektor pariwisata menyumbang 4,1% total PDB negara dan mampu menyerap 14,7% total tenaga kerja. Menurut Spillane (2019), Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Sebagai industri multisektoral, pariwisata tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan lokal tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (UNWTO, 2023).

Kehadiran sektor pariwisata turut menjadi katalisator berkembangnya berbagai sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, akomodasi, perhotelan, dan industri kreatif, sehingga dapat menciptakan dampak berlipat yang signifikan terhadap perekonomian. (Cooper et al., 2023). Dengan berbagai dampak positif tersebut, pengelolaan destinasi wisata yang baik menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan industri ini.

Salah satu destinasi wisata unggulan di kota Padang adalah Pantai Padang. Destinasi ini memiliki daya tarik utama karena letaknya yang

strategis dipusat kota, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Dalam tiga tahun terakhir data dari dinas pariwisata kota padang (2023) menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, setelah pandemi Covid 19, dengan dominasi wisatawan domestik. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi pemerintah untuk terus mengembangkan kawasan Pantai Padang guna meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi pengunjung. Secara lengkap data kunjungan wisata dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1 Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Padang

Jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik		
	2021	2022	2023
Mancanegara	1.538,00	22.995,00	29.912,00
Domestik	5.384.236,00	2.832.140,00	3.631.035,00
Jumlah	5.472.587,00	2.855.135,00	3.660.947,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas destinasi wisata, pemerintah kota Padang telah melakukan beberapa inisiatif, salah satunya adalah pembentukan Pusat Kuliner Pantai Padang di jembatan Cimpago. Pada bulan September 2023, Pemerintah Kota Padang memberikan tempat berjualan baru untuk pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Pantai Padang yang lokasinya berada di samping Jembatan Cimpago dan dahulunya merupakan lahan parkir (Zulfikar, 2023). Dalam (padang.go.id), Pembangunan pusat kuliner Pantai Padang ini, merupakan Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Karena keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Purus mengurangi estetika kawasan wisata.

Berdasarkan informasi dari TribunPadang, Dinas Pariwisata mencatat bahwa 130 PKL direncanakan untuk dipindahkan ke Pasar Kuliner Pantai Padang. Namun, hingga saat ini baru 73 PKL yang melaporkan untuk menggunakan lokasi tersebut. Hal ini disebabkan karena masih adanya sejumlah PKL yang menolak untuk direlokasi, meskipun kebijakan ini telah mendapatkan dukungan dari sekitar 900 ribu warga Padang.

Hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya tingkat terkeisian Pusat Kuliner, ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi baru, serta minimnya fasilitas publik yang mendukung kepuasan pengunjung. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pedagang yang bernama Yeti pada tanggal 20 Januari 2025, berikut hasil wawancara awal penulis yaitu :

“...di pusat kuliner pantai padang masih sangat sepi pengunjung, dalam sehari kami cuma laku 4-5 menu paling banyak kadang juga dalam sehari ga ada yang laku satupun, sehingga banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan diluar area pusat kuliner pantai padang...”

Dalam konteks Tata Kelola destinasi wisata, Hakim (2018:3) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebuah pariwisata dapat berkembang jika pariwisata itu dikelola dengan baik, prinsip tata kelola kepariwisataan yang kolaboratif sangat diperlukan untuk menunjang kepariwisataan. Kemudian Henderson (2023) menyatakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing suatu kawasan wisata perlu ketersediaan

fasilitas publik yang memadai dan aksesibel.

Dalam upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, estetis serta untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada para pedagang di Pantai Purus Kota Padang maka Pemerintah Kota Padang dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang telah diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, Perda ini dirancang sebagai landasan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas PKL secara terstruktur, dengan tujuan menciptakan tatanan kota yang lebih tertib dan teratur, serta dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Perda ini memberikan aturan yang jelas mengenai di mana dan bagaimana pedagang dapat berjualan dengan tetap memperhatikan PKL dan kenyamanan pengunjung, Di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 memiliki poin penting yang mengatur tentang keberadaan PKL di Kota Padang. Salah satunya adalah ketentuan mengenai legalitas tempat berjualan bagi PKL. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa pedagang kaki lima yang resmi adalah pedagang yang tempat berjualannya telah ditetapkan dan diberi izin oleh Wali Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aktivitas jual beli di ruang publik tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan atau merusak fasilitas umum. serta didukung oleh Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 253 Tahun 2014 yang menetapkan Pantai

Padang sebagai Kawasan Wisata.

Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan penataan, sehingga semua prosedur dan mekanisme dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pemerintah menghasilkan suatu inovasi kebijakan publik yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 161 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 3 tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki (PKL) di objek wisata pantai padang, dimana maksud dan tujuan umum dari penertiban Keputusan Walikota Padang Nomor 161 tahun 2007 adalah pertama, Menyediakan ketertiban, keamanan, dan estetika di Pantai Padang sebagai objek wisata. Kedua, mengatur penggunaan lahan dengan maksud meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengunjung di Pantai Padang. Ketiga, merencanakan dan mencatat pedagang sesuai dengan jumlah pedagang dan luas lahan yang tersedia. Keempat, menjamin kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pedagang di Pantai Padang.

Namun dalam implementasinya ditemukan bahwa para PKL lebih memilih berjualan di luar lokasi Pusat Kuliner Pantai Padang karena pengunjung merasa pendapatan mereka berkurang setelah dilakukan penetapan lokasi pemerintah kepada para PKL.

Dalam perencanaannya Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Syani juga menjelaskan pasar kuliner yang ditawarkan pemerintah untuk pedagang kaki lima akan disediakan tenda dan karpet.

Yudi menambahkan, dengan adanya Pasar Kuliner Pantai Padang, nantinya akan menjadi pusat kuliner di tepian pantai yang menarik dan bersih. Bagi pedagang nanti akan kita fasilitasi tenda, lalu dibuatkan karpet agar pembeli bisa duduk (lesehan). Konsep ini juga untuk menjaga kebersihan Pantai Padang" tambahnya. (Kurniati TribunPadang 2023)

Namun dalam pengelolaannya fasilitas publik yang ada di Pusat Kuliner Pantai Padang masih jauh dari kata layak karna banyaknya para PKL yang tidak lagi berjualan di Pusat Kuliner dan tidak adanya penataan yang baik diberikan pemerintah terhadap PKL seperti yang ada di Pasar Kuliner Padang Panjang yang ditata dengan baik oleh Pemerintah, Berikut observasi awal penulis dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1 Kondisi Stand Pusat Kuliner Pantai Padang

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan fakta di lapangan bahwa jumlah PKL yang ada di Pusat Kuliner Pantai Padang tidak seperti apa yang disampaikan pada berita, di berita dikatakan bahwa jumlah PKL yang direlokasikan sebanyak 73 PKL, namun setelah penulis melakukan observasi ditemukan bahwasanya jumlah PKL jauh dari apa

yang telah diberitakan. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadinya Tata Kelola yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Kondisi ini tidak hanya menghambat potensi kawasan sebagai destinasi wisata yang inklusif, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Ketidakpuasan pengunjung berpotensi mengurangi tingkat kunjungan ulang dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola fasilitas publik di Kota Padang. Berbeda dengan pasar kuliner Padang Panjang yang sangat ramai dikunjungi dan memiliki Tata Kelola yang baik seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Kondisi Stand Pasar Kuliner Padang Panjang
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Gambar 1.2 Gambar diatas menunjukkan bahwa pasar kuliner Padang Panjang yang memiliki pengelolaan yang baik dan banyak dikunjungi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengelolaan antara Pasar Kuliner Padang Panjang dan Pusat Kuliner Pantai Padang terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar Kuliner Padang Panjang dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga menjadi salah satu objek wisata yang sering

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sementara itu, meskipun pemerintah Kota Padang telah melakukan realokasi ke Pusat Kuliner Pantai Padang dengan tujuan menjadikannya sebagai destinasi wisata yang ramai, potensi lokasinya yang berada di tepi pantai seharusnya dapat lebih dimaksimalkan agar menarik lebih banyak wisatawan. Akan tetapi hasil observasi Penulis menunjukkan bahwa Pusat Kuliner Pantai Padang masih jauh dari pengelolaan yang baik.

Dari sisi regulasi, meskipun Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan PKL. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol keberadaan PKL di sekitar Pantai Padang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, mempertahankan keindahan alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. namun implementasinya belum maksimal. Seperti yang penulis lihat dalam observasi :



Gambar 1.3 Penumpukkan Sampah Di Sekitaran Pusat Kuliner Pantai Padang

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa timbulan sampah dikawasan pasar kuliner pantai padang, hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan belum maksimal sesuai dengan perencanaan. Selain itu, aksesibilitas infrastruktur di kawasan Pantai Padang masih menjadi kendala utama. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa pengunjung, banyak pengunjung yang merasa tidak puas terhadap fasilitas publik yang tersedia, seperti jalur pedestrian (jalur khusus untuk pejalan kaki yang sejajar dengan jalan raya), toilet umum, sampah yang berserakan, dan akses bagi penyandang disabilitas.

Melihat urgensi permasalahan ini, evaluasi tata kelola pusat kuliner pantai padang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas publik yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan secara inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Saya menyadari betapa pentingnya perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat dalam membangun sebuah tempat wisata. kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat dan pedagang, dengan infrastruktur yang tertata rapi, pelayanan publik yang baik dan efisien, serta lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pusat kuliner pantai padang yang tidak sesuai dari yang direncanakan,
2. Pengunjung merasa tidak puas dengan fasilitas publik yang ada di Pusat Kuliner Pantai Padang.
3. Pedagang merasa tidak diberikan tempat dan fasilitas yang layak.
4. Masih banyaknya sampah dikawasan Pusat Kuliner Pantai Padang.
5. Ketidaknyamanan pengunjung Pusat Kuliner Pantai Padang karena masih banyaknya aksi pungutan liar, pengamen yang meminta uang secara paksa.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mengelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik.

F. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, dan pertimbangan bagi Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Kepala bidang destinasi dan daya Tarik

wisata, sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan dalam tata Kelola pusat kuliner pantai Padang.

- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, data lapangan yang telah dipaparkan mengenai Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang, belum berjalan dengan optimal. Setelah melakukan penelitian di lapangan merujuk kepada pendapat Lloyd & Aho (2020). Adapun kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata Kota Padang telah dilaksanakan dengan dukungan regulasi yang jelas, seperti Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun 2014. Perencanaan relokasi PKL sudah dilakukan melalui penyediaan lokasi berjualan dan fasilitas fisik seperti kanopi serta pelatihan keterampilan bagi pedagang. Namun, pengorganisasian belum dilakukan, dan pengawasan di lapangan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, perlu adanya penguatan dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan berkala agar kebijakan tata kelola kawasan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
2. Faktor Pendukung, *Pertama* keberadaan dasar hukum yang kuat, *Kedua* penyediaan fasilitas fisik oleh pemerintah, *Ketiga* pelatihan usaha untuk meningkatkan kualitas PKL.

3. Faktor Penghambat, *Pertama* Penolakan dari sebagian besar PKL untuk direlokasi akibat kekhawatiran penurunan pendapatan, *Kedua* minimnya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata. *Ketiga* tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata

B. Saran

1. Dinas Pariwisata sebaiknya meningkatkan fasilitas dan sosialisasi dengan menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang.
2. Diharapkan Dinas Pariwisata Kota Padang dapat menindaklanjuti setiap bentuk upaya pengembangan yang telah dibuat, khususnya dalam pengelolaan, agar nantinya terjadi tata kelola yang baik.
3. Dibutuhkan sistem pemantauan yang terstruktur untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan menilai kendala serta potensi secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, H. (2021). Implementasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* Terhadap Penyandang Tunanetra Dalam Pelayanan Fasilitas Publik Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Akbar, A. T., & Pangestuti, E. (2017). Peran Kuliner Dalam Meningkatkan Citra Destinasi Pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(1), 153-159.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research And Evaluation Methods* (4th Ed.). Sage Publications.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Anderson, K., & Lee, S. (2023). *Sustainable Management Of Public Facilities: Environmental Perspectives*. *Journal Of Environmental Management*, 45(2), 234-248.
- Ayu, N. (2024). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional (Pdrb) Sumatera Barat (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2023). *Padang Dalam Angka 2023*. Bps Kota Padang.
- Davidson, R. (2019). *Tourism Destination Management: Principles And Practice*. Routledge.
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang. (2023). *Laporan Kinerja Sektor Pariwisata Kota Padang Tahun 2022*. Pemkot Padang.
- Fadhila, N., Aliyah, I., & Permana, C. T. H. (2023). Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Kuliner Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5(1), 172-183.
- Hadinoto, K. (2020). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Ui Press.
- Hakim, A. R. (2023). *Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Desa Wisata (Studi Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Henderson, J.C. (2019). *Food Tourism: A Practical Marketing Guide*. Channel View Publications.
- Intan, A. (2024). *Penolakan Pkl Perempuan Terhadap Relokasi Penataan Pantai Purus Kota Padang Tahun 2023* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Irfan, I., Izziah, I., & Anggraini, R. (2017). Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel Pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat, Lansia Dan Penyandang Cacat. *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 533-542.
- Kim, Y.G., & Iwashita, C. (2021). *Integrating Food Tourism With Local Attractions: A Sustainable Approach*. *Journal Of Tourism Studies*, 33(2), 145-160.
- Metta Primaningtyas, "Pengaruh Aksesibilitas, Atribut Fisik, Kesehatan Lingkungan Dan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Bermukim (Studi Kasus Pada Pt. Armada Hada Graha Magelang)", Artikel, Hlm. 11
- Putri, A. (2021). Analisis Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang

- Disabilitas Di Kawasan Wisata Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(2), 45-60.
- Putri, R.A. (2023). Evaluasi Aksesibilitas Kawasan Wisata Kuliner Pantai Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(3), 234-249.
- Rakib, M., & Farid, R. S. (2023). Buku-Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bahari Sulawesi Barat. Asmudrono, R. K., Tilaar, S., & Suryono, S. (2021). Evaluasi Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Pariwisata Di Kawasan Wisata Pantai Bunga Indah Desa Kuhanga. *Spasial*, 8(1), 57-66.
- Ramadhan, H., Et Al. (2022). Problematika Koordinasi Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Kuliner: Analisis Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(4), 156-171.
- Rosanti, D., Idris, A., & Kalalinggi, R. (2017). Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(2), 255-266.
- Sesde, S. (2021). *Strategi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pantai Pasir Panjang Di Kabupaten Kerinci Berbasis Aspek 3a (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Situmorang, R., Abdullah, F., & Yulianti, M. (2021). "Evaluasi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Padang". *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 10(3), 167-182.
- Spillane, J. (2019). "Ekonomi Pariwisata: Sejarah Dan Prospeknya". Kanisius.
- Susilo, Maharani, R. A. (2022). *Strategi Pengembangan Wisata Kuliner Pantai Kuranji Dalam Kecamatan Labuapi Lombok Barat* (Doctoral Dissertation, Uin Mataram).
- Susumaningsih, E., Purnawan, P., & Yossyafra, Y. (2020). Studi Aksesibilitas Objek Wisata Di Kabupaten Pasaman. *Rang Teknik Journal*, 3(1), 40-45.
- World Bank. (2020). "Governance And Development: The Importance Of Institution Building". *World Bank Publications*.
- Yoeti, O.A. (2020). "Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata". Pradnya Paramita.
- Yudhanta, W. C. (2018). Pengaruh Konfigurasi Dan Visibilitas Ruang Pada Aksesibilitas, Studi Kasus Pada Kawasan Xt Square Yogyakarta. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 12(1), 67-76.

Website

<https://padangkita.com/kalangan-disabilitas-uji-akses-kawasan-wisata-pantai-padang-hasilnya-pembangunan-masih-diskriminatif/> \

<https://pariwisata.padang.go.id/pantai-padang>

<https://jurnal.stieparapi.ac.id/index.php/jtec/article/view/78/86>